ABSTRAK

Lili Faridloh, 2020610113, Analisis Akuntansi Pengelolaan Tanah Kas Desa Sebagai Aset Desa (Studi di Desa Kenduren Kecamatan Wedung Kabupaten Demak).

Pembangunan bertujuan untuk tercapainya masyarakat adil dan makmur sebagaimana yang sudah tertuang dalam undang-undang dasar Negara Republik Indonesia. Pemutusan pembangunan disuatu daerah berdasarkan sektor perekonomian, dimana perekonomian merupakan penggerak utama pembangunan serta adanya kualitas sumber daya manusia guna mendukung keberhasilan sebuah pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui pengelolaan tanah kas desa sebagai aset desa pada Pemerintahan Desa Kenduren, dan menerapkan pengelolaan tanah kas desa dalam perspektif hukum islam. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus, objek penelitian terletak di Desa Kenduren Kecamatan Wedung Kabupaten Demak. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Data yang sudah terkumpul, kemudian diolah dengan teknik redukasi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Komponen Pendapatan Desa Kenduren bersumber dari Pendapatan Asli Desa yang diperoleh dari hasil lelang tanah kas desa . Sumber dari Dana Desa diperoleh dari APBN yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur desa, sedangkan Alokasi Dana Desa diterima dari APBD yang digunakan sebagai tunjangan perangkat desa. Bagi hasil pajak dan retribusi daerah yang diperoleh dari hasil pemungutan pajak warga, serta sumber dari Bantuan keuangan Kabupaten dan Provinsi yang digunakan untuk pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. (2) Pelaporan akun Pendapatan Desa Kenduren diperoleh dari hasil sewa menyewa tanah kas desa sebagai sumber utama Pendapatan Asli Desa. Pengelolaan tanah kas desa pada Pemerintahan Desa Kenduren menggunakan sistem lelang dengan masa kelola 1 tahun. Prosedur sewa dilakukan secara terbuka dengan adanya surat perjanjian sebagai bukti pindah pengalihan kekuasaan. Biaya oprasional pelaksanaan lelang ditetapkan sebesar 5% yang dipergunakan untuk biaya penyelenggaraan lelang dan honor tim pengawas serta panitia lelang. (3) Hasil dari lelang kemudian disetorkan ke kas desa melalui bendahara desa dengan harga sewa yang sudah ditetapkan sesuai Perbup Kabupaten Demak Nomor 25 Tahun 2022. Nilai nominal yang sudah disepakati kemudian dicantumkan dalam APBDes tahun anggaran berjalan sebagai bentuk keterbukaan, dari hasil pengelolaan tanah kas desa digunakan untuk pembangunan infrastruktur desa yang tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat.

Kata Kunci : *Pemerintah Desa, Pengelolaan, Tanah Kas Desa*